

Komunitas Politis: Fakta atau Hipotesa?⁶⁰ Sebuah Pendekatan Fenomenologi Politis

Reza A.A Wattimena⁶¹

Abstract:

In this paper, I want to give description and analysis concerning the meaning of the term political community. This paper also can be seen as a participation in the perennial debates concerning the problem of the order in the philosophy of social sciences. I will use phenomenology as a method to approach this problem as it developed by John Drummond and Edmund Husserl. The main argument is that the political community is a social fact that develop through hypothesis, and a hypothesis that based always on social fact. In the end, I will give my critical remarks on this argument.

Keywords: *political community, the social, natural community, voluntary community*

Abstrak

Di dalam tulisan ini, saya akan menjabarkan makna dan proses terbentuknya komunitas politis. Tulisan ini juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk partisipasi di dalam diskusi tentang problematika tatanan, atau problem “yang sosial”. Saya menggunakan pendekatan fenomenologi yang dijabarkan oleh John Drummond yang mengacu langsung pada teks-teks Edmund Husserl, bapak fenomenologi. Argumen utama Drummond adalah, bahwa komunitas politis merupakan fakta yang berkembang melalui hipotesa, dan hipotesa yang di dalam perkembangannya selalu berpijak pada fakta. Di bagian akhir saya akan mengajukan tanggapan kritis terhadap argumen tersebut.

Kata kunci: komunitas politis, yang sosial, komunitas alamiah, komunitas sukarela.

⁶⁰ Ide menulis judul ini saya peroleh, ketika mengikuti kuliah *Masyarakat: Fakta atau Hipotesa?* Di STF Driyarkara, Jakarta, 2006, bersama B. Herry Priyono.

⁶¹ Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala Surabaya

PENDAHULUAN

Saya ingin mengajak anda membaca koran Kompas 24 Mei 2011. Bukalah tulisan yang berjudul *Bangsa Kehilangan Visi Maju*. Coba juga buka tulisan yang berjudul *Godaan Korupsi tidak Mengenal Jender*. Dan coba anda buka tulisan yang berjudul *Singapura dilibatkan untuk mencari Nunun* pada koran Kompas 25 Mei 2011. Saya ingin anda fokus pada kata-kata berikut ini; “Bangsa”, “Jender”, dan “Singapura”.⁶²

Ketiga kata itu menggambarkan satu hal, yakni kolektivitas (*collectivity*). Ada sesuatu yang berkumpul di dalamnya, dan membentuk satu kesatuan (*unity*) yang memiliki keutuhannya tersendiri, yang berbeda dari bagian-bagian yang membentuknya (Singapura jelas berbeda dengan orang-orang Singapura yang jumlahnya cukup banyak). Satu kesatuan inilah yang disebut oleh para filsuf ilmu-ilmu sosial sebagai “Yang Sosial” (*The Social*). Pertanyaan yang menjadi pergulatan mereka selama ini adalah, apakah arti “Yang Sosial” itu? Bagaimana proses terbentuknya? Bagaimana proses perubahannya? Inilah pertanyaan yang ada di jantung hati filsafat ilmu-ilmu sosial (*philosophy of social sciences*).

Bangsa adalah komunitas politik. Jender dan Singapura pun juga dapat dikategorikan sebagai suatu komunitas politis. Di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang memiliki kesamaan, dan tergabung menjadi suatu kelompok; suatu kolektivitas tertentu. Giddens menyebutnya sebagai struktur sosial (*social structure*). Roy Bhaskar menyebutnya sebagai ontologi sosial (*social ontology*). Sementara Bourdieu menyebutnya sebagai bentukan dari *habitus*.⁶³

Di dalam tulisan ini, saya ingin menjelaskan makna sekaligus proses pembentukan komunitas politis (*political community*) dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.⁶⁴ Untuk itu saya akan membagi tulisannya ini ke dalam empat bagian. Awalnya saya akan menjabarkan proses terciptanya politik dengan mengacu pada pandangan John Drummond dan Edmund Husserl (1). Lalu –masih berpijak pada pandangan Drummond dan Husserl- saya akan menjabarkan konsep komunitas politis sebagai sesuatu yang alamiah (2). Berikutnya saya akan menjabarkan konsep komunitas politis sebagai bentukan sukarela dari manusia (3). Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan serta tanggapan kritis dari saya (4).

⁶² Harian Kompas, Rabu 24 Mei 2011 dan Kamis 25 Mei 2011.

⁶³ Wattimena, Reza A.A., *Filsafat dan Sains*, Grasindo, Jakarta, 2008.

⁶⁴ Di dalam filsafat ilmu-ilmu sosial inilah yang dikenal juga sebagai problematika tatanan. Untuk keterangan lebih jauh lihat Stephen P. Turner and Paul A. Roth, *Philosophy of the Social Sciences*, Blackwell, United Kingdom, 2003.

FENOMENOLOGI POLITIK

Fenomenologi (*phenomenology*) adalah sebuah cara mendekati realitas yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Edmund Husserl.⁶⁵ Cita-cita dasarnya adalah menjadikan fenomenologi sebagai ilmu tentang kesadaran (*science of consciousness*). Dalam arti ini fenomenologi adalah “sebuah upaya untuk memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama.”⁶⁶ Fenomenologi sendiri secara harafiah berarti refleksi atau studi tentang suatu fenomena (*phenomena*). Fenomena adalah segala sesuatu yang tampak bagi manusia. Fenomenologi terkait dengan pengalaman subyektif (*subjective experience*) manusia atas sesuatu. Dalam hidup sehari-hari, orang sebenarnya telah melakukan praktek fenomenologi, ketika mereka melakukan proses refleksi, yakni proses bertanya pada dirinya sendiri.

Dengan demikian fenomenologi adalah sebuah cara untuk memahami kesadaran yang dialami oleh seseorang atas dunianya melalui sudut pandangnya sendiri. Jelas saja pendekatan ini amat berbeda dengan pendekatan ilmu-ilmu biologis ataupun positivisme.⁶⁷ Ilmu-ilmu biologis ingin memahami cara kerja kesadaran melalui unsur biologisnya, yakni otak. Dalam arti ini mereka menggunakan sudut pandang orang ketiga, yakni sudut pandang pengamat. Kesadaran bukanlah fenomena mental, melainkan semata fenomena biologis. Sebaliknya fenomenologi menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni dengan “melihat pengalaman manusia sebagaimana ia mengalaminya, yakni dari sudut pandang orang pertama.”⁶⁸

Namun fenomenologi juga tidak mau terjatuh pada deskripsi perasaan semata. Yang ingin dicapai fenomenologi adalah pemahaman akan pengalaman konseptual (*conceptual experience*) yang melampaui pengalaman inderawi itu sendiri. “Pengalaman inderawi hanyalah titik tolak untuk sampai pada makna yang lebih bersifat konseptual, yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu sendiri.”⁶⁹ Dalam hal ini yang ingin dipahami adalah kesadaran (*consciousness*), bukan dalam arti kesadaran biologis maupun perilaku semata, tetapi kesadaran sebagaimana dihayati oleh orang yang mengalaminya. Kesadaran orang akan pengalamannya sendiri disebut sebagai pengalaman konseptual. Bentuknya bisa beragam mulai dari imajinasi, pikiran, sampai hasrat tertentu, ketika orang mengalami sesuatu.

⁶⁵ Pada bagian ini saya mengikuti Wattimena, Reza A.A., “Berbagai Metode Berfilsafat”, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Wattimena, Reza A.A (ed), Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal. 188-195.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 189.

⁶⁷ Lihat kelemahan pendekatan positivisme di dalam memahami manusia dalam Budi Hardiman, F., *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

⁶⁸ Wattimena, Reza A.A., “Berbagai...”, hal. 189.

⁶⁹ *Ibid*.

Salah satu konsep kunci di dalam fenomenologi adalah makna (*meaning*). Setiap pengalaman manusia selalu memiliki makna. Dikatakan sebaliknya manusia selalu memaknai pengalamannya akan dunia. Ini yang membuat kesadarannya akan suatu pengalaman unik. Orang bisa melakukan hal yang sama, namun memaknainya secara berbeda. Orang bisa mendengarkan pembicaraan yang sama, namun memaknainya dengan cara berbeda. Lebih jauh dari itu, "pengalaman bisa menjadi bagian dari kesadaran, karena orang memaknainya."⁷⁰ Di dalam proses memaknai sesuatu, orang bersentuhan dengan dunia sebagai sesuatu yang teratur dan dapat dipahami (*order and intelligible*). Apa yang disebut sebagai "dunia" adalah suatu kombinasi antara realitas yang dialami dengan proses orang memaknai realitas itu.

Fenomenologi berada pada status yang berbeda dari ilmu alam maupun ilmu sosial. Di dalam tulisan-tulisannya, Husserl menegaskan, bahwa fenomenologi tidak mau mempersempit manusia hanya ke dalam perilakunya (*human behavior*), seperti yang terdapat di dalam positivisme.⁷¹ Fenomenologi juga tidak mau jatuh dalam melakukan generalisasi semata berdasarkan pengamatan atas perilaku manusia. "Baginya untuk memahami manusia, fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari sudut pandang orang yang mengalaminya."⁷²

Husserl memperkenalkan model baru di dalam memahami manusia. Ketika sedang melakukan penelitian tentang manusia, seorang peneliti bukanlah subyek yang terpisah dari yang ditelitinya.⁷³ Dengan kata lain peneliti dan yang diteliti melebur menjadi satu dalam interaksi yang khas. Dalam proses ini peneliti tidak boleh terjebak pada pengalaman partikular, tetapi harus mampu menembus masuk ke dalam pengalaman kesadaran (*experience of consciousness*) orang terkait. Seorang peneliti harus mampu memahami makna dari manusia tersebut, dan mencoba melihat dunia dari kaca mata kesadarannya.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, fenomenologi adalah ilmu tentang esensi kesadaran (*essence of consciousness*), sebagaimana dilihat dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Namun apakah sesungguhnya arti kesadaran (*consciousness*)? Di dalam tulisan-tulisan Husserl, setidaknya ada dua arti kesadaran. Yang

⁷⁰ *Ibid*, hal. 190.

⁷¹ Tentang batas-batas positivisme bisa dilihat di Budi Hardiman, F., *Melampai...*, 2003.

⁷² Wattimena, Reza A.A., "Berbagai..." hal. 191.

⁷³ Di dalam filsafat ilmu-ilmu sosial, ini disebut sebagai hermeneutika ganda, di mana terjadi interaksi saling mempengaruhi antara san peneliti dengan subyek yang sedang ditelitinya. Pemikir yang pertama kali merumuskan konsep ini secara sistematis adalah Anthony Giddens. Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Double_hermeneutic diakses pada 21 Maret 2011 pk. 09.20.

pertama, kesadaran adalah dasar dari pengalaman (*foundation of experience*). Dikatakan sebaliknya setiap pengalaman manusia adalah ekspresi dari kesadaran itu sendiri (*expression of consciousness*). Segala bentuk pengalaman disadari oleh orang secara subyektif.⁷⁴ Yang kedua, kesadaran manusia selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Inilah satu konsep yang disebut Husserl sebagai intensionalitas kesadaran (*intentionality of consciousness*). Intensionalitas merupakan karakter dasar pikiran manusia. Pikiran selalu merupakan pikiran akan sesuatu, dan tidak pernah merupakan pikiran pada dirinya sendiri.

Pada kesan pertama fenomenologi terkesan hanya berfokus pada level individual. Artinya fenomenologi hanya cocok untuk memahami kesadaran perorangan, dan bukan kelompok. Namun di dalam tulisannya, John Drummond menunjukkan, bahwa fenomenologi juga bisa digunakan untuk memahami “yang politis” (*the political*) itu sendiri.⁷⁵ Bahkan ia menggunakan pendekatan ini untuk memahami sejarah terjadinya komunitas politis (*political community*), mulai dari komunitas kultural tradisional (*cultural community*), sampai menjadi komunitas politis legal modern (*modern legal political community*), seperti yang kita kenal sekarang ini. Dengan demikian sebagai sebuah pendekatan, fenomenologi cukup lentur digunakan, bahkan untuk memahami fenomena politik itu sendiri.

Politik secara harafiah adalah “aktivitas yang membuat manusia mencipta, melestarikan, dan menerapkan aturan-aturan di dalam hidupnya.”⁷⁶ Maka politik jelas merupakan sebuah aktivitas sosial (*social activities*). Di dalam kata politik, secara fenomenologis, dapatlah dikatakan, manusia sekaligus ada dan mencipta tata sosial yang melingkupinya. Di dalam tata sosial tersebut, selalu ada konflik dan keberagaman (*diversity*). Juga di dalam tata sosial tersebut, selalu ada dorongan dari dalam diri setiap orang untuk bekerja sama. Maka dapatlah disimpulkan menurut Heywood, politik sebagai sebuah proses bekerja sama untuk melampaui konflik, akibat keberagaman pola hidup yang ada di dalamnya.⁷⁷ Tentu saja seperti dicatat oleh Heywood, tidak semua konflik yang ada bisa diselesaikan.

Secara fenomenologis dapat pula dikatakan, bahwa politik bukan semata kenyataan sosial (*social reality*) itu sendiri, tetapi juga merupakan suatu seni untuk

⁷⁴ Wattimena, Reza A.A., “Berbagai....” hal. 192.

⁷⁵ Lihat salah satu buku yang menjadi acuan utama saya Drummond, John. J., “Political Community”, dalam *Phenomenology of the Political*, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed), Kluwer Academic Publisher, London, 2000.

⁷⁶ Untuk bagian tentang politik, saya mengacu pada

<http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/what.asp> diakses pada 19 Maret 2011. Pk. 07.30. Palgrave adalah penerbit akademik. Situs ini mengacu pada buku Andrew Heywood yang diterbitkan oleh penerbit terkait.

⁷⁷ *Ibid.*

memimpin, atau memerintah.⁷⁸ Di dalam kata politik terkandung makna manajemen urusan publik (*public affairs management*). Dan di dalam kata manajemen urusan publik sudah selalu terkandung makna tata kelola konflik, akibat keberagaman kepentingan ataupun pandangan dunia yang ada. Dalam arti ini politik adalah kompromi di level sosial akan berbagai hal yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri (*social compromise*). Inilah makna fenomenologis dari politik, sebagaimana saya tafsirkan dari pemikiran Heywood. Dalam arti ini politik tidaklah dilihat segi normatifnya, seperti dalam etika politik, melainkan segi deskriptifnya, yakni sebagai tata kelola sosial yang melibatkan kompromi, guna menjaga keberadaan tata sosial itu sendiri (*the existence of social order*).

Namun ada pengertian lain tentang politik. Politik tidak hanya soal ruang publik (*public sphere*),⁷⁹ di mana orang-orang berkumpul, tetapi juga merupakan urusan privat (*private matters*). Politik beroperasi di ruang privat, ketika politik dipahami sebagai relasi-relasi kekuasaan yang bergerak di masyarakat, demikian tulis Heywood.⁸⁰ Di dalam sejarah filsafat politik, setidaknya ada dua macam bentuk analisis tentang makna politik. Yang pertama adalah teori normatif tentang politik (*normative theory*). Di dalamnya para filsuf merumuskan tentang bagaimana seharusnya sebuah politik itu beroperasi di masyarakat.⁸¹ Sementara yang kedua adalah pendekatan empiris di dalam memahami politik (*empirical approach*). Di dalamnya para filsuf mencoba memahami dinamika institusi dan struktur sosial organisasi yang ada di masyarakat.⁸² Teori strukturasi dan teori perilaku (*behavioral theory*), menurut Heywood, dominan di dalam pendekatan ini.⁸³

Pada hemat saya fenomenologi dapat membantu kita untuk dapat memahami politik pada dirinya sendiri, yakni politik sebagaimana ia menampakkan diri kepada kita. Di dalam positivisme klasik, tujuan itu dicapai dengan pertama-tama membedakan antara fakta dan nilai (*facts and values*) di dalam politik. Namun pandangan ini kemudian ditantang. Bagaimana mungkin orang bisa mencerp fakta tanpa nilai yang ia pegang, baik sadar ataupun tidak? Bagaimana mungkin observasi

⁷⁸ Tentang ontologi dari realitas sosial, anda bisa membaca secara lengkap di Wattimena, Reza A.A., *Filsafat dan Sains*, Grasindo, Jakarta, 2008.

⁷⁹ Lihat berbagai uraian yang amat mendalam soal problematik ruang publik dalam Hardiman, F. Budi., *Ruang Publik*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

⁸⁰ Heywood, dalam Palgrave.

⁸¹ Pada era sekarang ini, salah satu filsuf politik normatif yang cukup ternama adalah Juergen Habermas. Untuk penjelasan lebih jauh mengenai filsafat politik Habermas, anda dapat melihat pada Budi Hardiman, F., *Demokrasi Deliberatif*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

⁸² Salah seorang filsuf yang pemikirannya cukup banyak perhatian dalam upayanya memahami dinamika institusi modern adalah Pierre Bourdieu. Untuk keterangan lebih jelas tentang pendapat Bourdieu, anda dapat melihat Wattimena, Reza A.A., *Filsafat dan Sains...*2008.

⁸³ Heywood, dalam Palgrave.

dilepaskan dari kerangka berpikir seseorang yang mengandung begitu banyak nilai, baik implisit ataupun eksplisit?⁸⁴ Di dalam hidupnya setiap orang, menurut Heywood, selalu menggondong paradigma dalam bentuk teori dan nilai yang ia yakini. Inilah yang membuat pada akhirnya pendekatan positivisme tradisional tidak lagi memadai, guna memahami realitas sosial.⁸⁵

Menurut Heywood salah satu konsep yang paling mendasar di dalam politik adalah konsep otoritas (*political authority*). Dengan kata lain secara fenomenologis, setiap bentuk tata politik selalu mengandaikan adanya otoritas di dalamnya, baik implisit maupun eksplisit. Dalam arti ini otoritas, menurut Heywood, adalah kekuasaan yang sah (*legitimate power*). Sementara baginya kekuasaan adalah “kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain”.⁸⁶ Kekuasaan hanya menjadi sah, ketika berada dalam bentuk otoritas.⁸⁷ Otoritas adalah sebarang pengakuan, bahwa perintah dari satu pihak itu layak, dan bahkan wajib, untuk dipatuhi secara tanpa paksaan ataupun manipulasi dalam bentuk apapun. “Dalam arti ini”, demikian tulis Heywood, “otoritas adalah kekuasaan yang diselubungkan dengan legitimasi atau keabsahan.”⁸⁸

Selain soal otoritas politik juga selalu sudah terkait dengan tata kelola (*governance*). Dan tata kelola tersebut dilakukan oleh suatu institusi yang bernama negara, atau pemerintah (*government*). Namun menurut Heywood walaupun pemerintah biasanya menjadi pihak yang mengelola, namun tata kelola itu sendiri tetap bisa berlangsung, walaupun suatu saat nanti, pemerintah atau negara tidak ada.⁸⁹ Jadi tata kelola bisa tetap terjadi, walaupun negara absen. Ini terjadi karena prinsip utama tata kelola bukanlah kehadiran negara, melainkan jaringan (*networks*) dan hirarki (*hierarchies*). Kedua hal itu selalu ada, walaupun pemerintah atau negara tidak ada. Jaringan bisa terbentuk melalui lahirnya organisasi-organisasi independen (*independent organizations*) di dalam masyarakat yang saling terhubung satu sama lain. Di dalam ideologi neoliberalisme, yang amat mengedepankan pasar bebas (*free trade*), peran pemerintah, atau negara, menjadi amat kecil.⁹⁰

⁸⁴ Uraian cukup panjang tentang ini bisa dilihat di buku saya Wattimena, Reza A.A., *Filsafat dan Sains....*, 2008.

⁸⁵ Heywood, dalam Palgrave.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Dengan nada yang agak negatif dan kritis, Antonio Gramsci, seorang filsuf Marxis abad ke-20, merumuskan konsep hegemoni untuk menjelaskan fenomena ini. Hegemoni adalah konsep yang menjelaskan suatu gejala, di mana Untuk lebih jelasnya silahkan lihat uraian Femia, Joseph, *Gramsci's Political Thought*, Clarendon Press, Oxford, 1981.

⁸⁸ Heywood, dalam Palgrave.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Konsep fundamentalisme pasar di mana pasar bebas dianggap mampu mengatur politik dan ekonomi masyarakat dapat ditemukan di dalam ideologi neoliberalisme. Untuk keterangan lebih

Secara fenomenologis dapatlah dikatakan, bahwa pemerintah adalah pihak yang memerintah. Dan dalam arti ini, memerintah berarti mengatur pihak lain. Maka juga dalam arti ini, memerintah tidak selalu hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga bisa berupa mekanisme tertentu, seperti mekanisme hukum, di mana tatanan dipertahankan. Menurut Heywood mekanisme ini bisa membantu suatu masyarakat membuat keputusan seadil mungkin, tanpa tergantung kebijaksanaan pimpinan masyarakat.⁹¹ Maka bentuk tata kelola yang dilakukan oleh suatu otoritas tertentu dapatlah ditemukan di berbagai tempat, seperti di keluarga, sekolah, perusahaan, dan bahkan pertemanan sehari-hari. Kata politik, tata kelola, otoritas, dan pengaturan, secara fenomenologis, terkait satu sama lain, tanpa bisa dipisahkan begitu saja.

Sebagaimana dinyatakan oleh Heywood, ada satu konsep lagi yang selalu inheren di dalam politik, yakni kekuasaan (*power*). Secara fenomenologis sejauh saya menafsirkan tulisan-tulisan Heywood, kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka kekuasaan selalu bersifat aktif, yakni kemampuan dari dalam diri seseorang, atau institusi, untuk melakukan sesuatu di dunia.⁹² Pada level individual kekuasaan, secara fenomenologis, adalah kemampuan untuk mencipta sesuatu, atau melakukan sesuatu. Pada level sosial kekuasaan, secara fenomenologis, adalah relasi.⁹³ Dalam arti ini relasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi pola pikir maupun perilaku orang lain. Bahkan bagi Heywood kekuasaan pada level politik, secara fenomenologis, selalu dapat dimengerti sebagai “kekuasaan atas orang lain” (*power over other people*).⁹⁴

Di dalam pemikiran John Drummond, kata fenomenologi dan kata politik terkait erat satu sama lain. Ia mencoba untuk memahami lahirnya komunitas politis dengan pendekatan fenomenologis. Jadi ia tidak hanya ingin memahami esensi politik, tetapi juga memahami mekanisme kelahiran tata politik. Dalam konteks ini layaklah kita mengajukan pertanyaan, apa yang melahirkan sebuah komunitas politis? Bagaimana mekanisme terbentuknya komunitas politik, jika dipahami secara fenomenologis?

dalam, anda bisa melihat di Steger, Manfred B. (et.al), *Neoliberalism*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

⁹¹ Heywood, dalam Palgrave.

⁹² *Ibid.* <http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/political.asp> diakses pada 19 Maret 2011. Pk. 07.40.

⁹³ Untuk pendalaman teori mengenai kekuasaan, anda dapat melihat di Sasongko, James. W., “Manusia, Karya, dan Kuasa”, dalam *Membongkar Rahasia Manusia*, Wattimena, Reza A.A., (ed), Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 197.

⁹⁴ *Ibid.* <http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/political.asp>

Inilah pertanyaan yang amat mendasar, yang menjadi dasar dari filsafat politik. Lebih dari 80 tahun lalu, Edmund Husserl merumuskan problematik itu dengan sangat baik. Baginya ada dua bentuk negara, yakni negara alamiah (*natural state*) dan negara artifisial (*artificial state*). Dalam arti ini negara adalah komunitas politis. Negara artifisial terbentuk dari tindakan politik yang disengaja (*voluntary action*), yakni pembentukan sebuah persekutuan (*union*). Sementara negara alamiah diwariskan dari generasi sebelumnya, dan biasanya dipimpin oleh satu pemimpin tunggal, seperti seorang kaisar, raja, atau bahkan tiran.⁹⁵

Namun menurut Drummond kedua argumen tersebut tidaklah bisa dipisahkan. Negara adalah suatu paradoks.⁹⁶ Dalam arti negara tercipta oleh dua hal yang berbeda, yakni sekaligus alamiah sekaligus berdasarkan kesepakatan.⁹⁷ Di satu sisi negara dan masyarakat adalah soal keterkaitan seorang dengan sejarah nenek moyangnya. Secara fenomenologis dapatlah dikatakan, bahwa kita selalu sudah ada di dalam kaitan dengan nenek moyang kita. Inilah yang disebutnya sebagai komunitas etnis-familial.⁹⁸ Juga dapatlah dikatakan bahwa ketika lahir, kita sudah selalu ada di dalam konteks kekuasaan tertentu, misalnya kekuasaan seorang ayah yang memiliki otoritas atas keluarganya.⁹⁹

Namun setiap orang tidak hanya selalu lahir dan ada di dalam konteks keluarganya, tetapi juga dalam konteks politis masyarakatnya. Ia bisa saja lahir dan hidup di dalam kepemimpinan seorang kaisar, presiden, ataupun seorang jenderal perang.¹⁰⁰ Disinilah bedanya. Bagi Drummond keluarga dan masyarakat adalah dua hal yang berbeda. Keluarga (*family*) adalah sesuatu yang terbentuk secara

⁹⁵ Edmund Husserl sebagaimana dikutip oleh Drummond, John. J., "Political Community", dalam *Phenomenology of the Political*, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed), Kluwer Academic Publisher, London, 2000. Untuk bagian ini saya mengikuti uraian Drummond.

⁹⁶ Paradoks adalah dua hal yang bertentangan, namun membentuk kesatuan makna yang mengandung kebenaran. Misalnya manusia itu sekaligus baik dan jahat. Atau negara itu sekaligus alamiah dan diciptakan. Lihat pemahaman tentang paradoks manusia dalam Snijders, Adelbert, *Manusia: Sintesis Paradoksial*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

⁹⁷ Konsep komunitas politis sebagai produk dari kesepakatan amat kental di dalam filsafat modern, terutama para teoritikus kontrak sosial, seperti J.J Rousseau dan Thomas Hobbes. Lihat buku berikut *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, David Boucher and Paul Kelly (eds), Routledge, London, 1994, hal. 35-50, dan 117-134.

⁹⁸ Drummond, "Political Community", hal. 29.

⁹⁹ Di dalam bukunya yang berjudul *Being and Time*, Heidegger menegaskan, bahwa manusia terlempar ke dalam dunia, selalu ada di dalam dunia, dan selalu ada bersama yang lain. Argumen ini sebenarnya ingin menegaskan, bahwa manusia sudah selalu ada di dalam komunitas. Penjelasan lebih jauh bisa dilihat di Heidegger, Martin, *Being and Time*, Joan Stambaugh (trans), New York Press, New York, 1996.

¹⁰⁰ Di dalam sejarah cukup lama komunitas politis itu adalah sekumpulan orang yang hidup di dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka tidak dipimpin oleh seorang raja ataupun kaisar, melainkan oleh seorang panglima perang yang dianggap bijaksana.

alamiah. Pola yang ada di dalamnya adalah pola cinta yang sifatnya spontan. Sementara masyarakat dengan tata politiknya adalah sesuatu yang diciptakan. Pola hubungan di dalamnya lebih berpijak pada nilai-nilai sosial, seperti keadilan, dan bukan pada nilai-nilai personal, seperti cinta spontan. Namun tepatkah pandangan tersebut? Benarkah komunitas politis –termasuk di dalamnya masyarakat dan negara- adalah sebagian bersifat alamiah, dan sebagian lainnya tidak?

Yang cukup ingin ditegaskan Drummond adalah, bahwa negara maupun masyarakat adalah suatu komunitas politis. Dan komunitas politis –pada hakekatnya- tidak pernah melulu hadir sebagai bentukan alamiah semata, ataupun hasil kesepakatan semata, melainkan kombinasi antara keduanya. Maka menurutnya analisis tentang negara dan masyarakat haruslah selalu terkait dengan analisis mengenai hakekat dari komunitas.¹⁰¹ Untuk menjelaskan ini ada dua hal yang kiranya mesti ditegaskan. Yang pertama, manusia –sebagai mahluk pembentuk polis- adalah mahluk yang otonom. Ia mampu dengan sadar mengaktualisasikan dirinya untuk menciptakan pribadi yang otentik.¹⁰² Yang kedua, dengan pemahaman semacam itu, maka penciptaan komunitas yang otentik juga dimungkinkan.¹⁰³ Dalam arti ini komunitas otentik adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang otentik, dan bisa terus mempertanyakan serta memperbaiki dirinya di dalam menanggapi perubahan.

Namun kita perlu mengambil jarak, dan mengajukan pertanyaan kritis berikut, apakah penjelasan ini sungguh menggambarkan apa yang terjadi, atau apa yang *seharusnya* terjadi? Inilah pertanyaan kritis yang diajukan oleh Drummond. Untuk menjawab ini ia mencoba meneliti tulisan-tulisan Husserl, serta latar belakang historis dari tulisan-tulisan tersebut.¹⁰⁴ Husserl hidup dan berkarya pada masa perang dunia pertama, dan situasi krisis yang diakibatkannya. Bahkan ketika Nazi berkuasa, ia mengalami diskriminasi, karena ia adalah orang Yahudi. Namun itu tidak membuatnya menyerah.¹⁰⁵ Ia tetap berkarya dan dengan itu membuktikan otentisitasnya sebagai manusia. Memang Husserl sendiri amat berfokus pada

¹⁰¹ Diskusi cukup dalam mengenai hal ini ada di dalam Wattimena, Reza A.A, *Filsafat dan Sains...*, hal. 262-276.

¹⁰² Drummond, "Political ...", hal. 30.

¹⁰³ Komunitas otentik terdiri dari pribadi-pribadi yang otentik. Untuk keterangan lebih jauh dapat dilihat di Golomb, Jacob, *In Search of Authenticity*, Routledge, London, 1995.

¹⁰⁴ Drummond, "Political ...", hal. 30.

¹⁰⁵ Di dalam salah satu wawancaranya, Husserl mengatakan, betapa ia kecewa akan akan diskriminasi yang ia alami. Bahkan ia tidak boleh masuk ke dalam perpustakaan universitas tempat ia puluhan tahun bekerja. Pada era pra perang dunia kedua, setelah Nazi berkuasa di Jerman, berbagai penemuan orang-orang Yahudi diabaikan. Bahkan begitu banyak orang Yahudi dipecah dari pekerjaannya, hanya karena mereka adalah orang Yahudi. Untuk keterangan lebih jauh bisa dilihat di <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsourc/holo.html> diakses pada Jumat 11 Maret 2011 pk. 15.12.

kajian abstrak soal proses berpikir manusia. Namun ia tetap berpegang teguh pada argumen, bahwa komunitas politik adalah kombinasi antara fakta (alamiah) dan hipotesa (kesepakatan politik).

KOMUNITAS ALAMIAH

Menurut Drummond salah satu konsep dasar yang digunakan Husserl di dalam pemikiran politiknya adalah konsep generativitas (*generativity*). Konsep ini menurut Drummond dipakai oleh Husserl untuk menegaskan aspek alamiah dari komunitas politis. Artinya komunitas politis bukanlah ciptaan manusia murni, melainkan hasil dari gerak alam itu sendiri. Secara singkat konsep generativitas dapatlah diartikan sebagai proses menciptakan sesuatu melalui proses yang amat lama dan bertahap, bahkan memakan waktu bertahun-tahun. Proses ini menciptakan apa yang disebut Giddens sebagai struktur sosial.¹⁰⁶ Orang-orang yang hidup di dalam struktur tersebut akan menerimanya dengan pasif, karena itu merupakan latar belakang yang memberikan arti bagi identitas mereka.

Setiap orang lahir di dalam komunitas, dan setiap komunitas terbentuk melalui proses generativitas ini. Setiap orang lahir selalu dalam keluarga, dan keluarga juga terbentuk melalui proses-proses yang memiliki pola yang sama, yakni kelahiran, masa dewasa, menikah, berkembang biak, menua, sakit, dan meninggal.¹⁰⁷ Namun seperti ditegaskan oleh Drummond, hakekat dari keluarga tidak semata-mata biologis, melainkan selalu sudah tertanam di dalam konteks yang lebih luas, yakni komunitas, seperti klan, masyarakat, etnis, dan komunitas kultural lainnya.¹⁰⁸ Komunitas ini pun –seperti sudah ditegaskan sebelumnya– terbentuk melalui proses generativitas. Dalam hal ini peran bahasa semakin jelas, terutama di dalam proses generativitas. “Komunitas kultural”, demikian tulis Drummond, “sekaligus adalah komunitas generatif alamiah. Proses generativitas ini dimungkinkan oleh bahasa.”¹⁰⁹

Sebenarnya amat menarik melihat keterkaitan antara keberadaan komunitas dan bahasa. Dalam hal ini menurut Drummond, setidaknya ada tiga peran bahasa. *Yang pertama*, bagi Drummond, bahasa memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan kepada anggota komunitas yang baru. Dalam arti ini pengetahuan

¹⁰⁶ Struktur ada di kepala manusia sebagai pelaku. Lihat Loyal, Steven, *The Sociology of Anthony Giddens*, Pluto Press, London, 2003, hal. 71-92.

¹⁰⁷ Drummond, John, “Political...”, hal. 31.

¹⁰⁸ Diskusi yang cukup mendalam tentang kultur dapat dilihat Wattimena, Reza A.A., “Menebar Garam di Atas Pelangi”, *Menebar Garam di atas Pelangi*, Hipolitus K. Kewuel, et.al (eds) STKIP Widya Yuwana Press, Madiun, 2010, hal. 93-116.

¹⁰⁹ Drummond, John, “Political...”, hal. 31.

tersebut melingkupi kepercayaan-kepercayaan tradisional, kebiasaan, aturan-aturan kultural, dan makna yang sebelumnya sudah ada di masyarakat. *Yang kedua*, para anggota komunitas baru juga memahami dan menghidupi pengetahuan-pengetahuan kultural tersebut dengan menggunakan bahasa. Mereka menerima, memahami, dan menerapkannya dengan menggunakan bahasa sebagai medium komunikasi, dan berpikir.

Yang ketiga menurut Drummond, bahasa dapat digunakan untuk memberi makna pada pengalaman bersama sebagai komunitas. Setiap interaksi antar manusia selalu dijembatani oleh bahasa. Dalam arti ini dapatlah dikatakan, bahwa bahasa merupakan elemen yang menciptakan kehidupan bersama. Dengan bahasa orang bisa membagikan pengalaman subyektifnya, dan berpartisipasi di dalam pembentukan identitas masyarakatnya. "Individu yang merupakan anggota masyarakat", demikian tulis Drummond, "berpartisipasi di dalam historisitas komunal yang tunggal yang dimungkinkan oleh penggunaan bahasa."¹¹⁰

Persepsi kita akan obyek selalu adalah dalam konteks horison kultural ini. Di dalam horison kultural ini terkandung pendapat-pendapat umum, kepercayaan-kepercayaan masyarakat, serta tradisi tempat kita lahir dan bertumbuh. Persentuhan kita dengan dunia diperantarai oleh horison kultural ini. Secara fenomenologis dapatlah dikatakan, bahwa aku sebagai pribadi selalu sudah ada di dalam dunia yang dipenuhi dengan horison kultural masyarakatku. Dan bahwa harapanku akan masa depan juga tertanam di dalam struktur bahasa maupun kepercayaan masyarakatku.¹¹¹ Jika aku adalah ikan, maka masyarakatku adalah air yang mengelilingiku, dan menentukan cara pandangku terhadap segala sesuatu.¹¹² Inilah yang disebut sebagai "rumah".

Drummond menyatakan dengan tegas, bahwa masyarakat dan negara adalah sesuatu yang bersifat alamiah, selama keduanya lahir dari komunitas generatif yang bersifat turun temurun. Inilah yang disebut sebagai komunitas kultural (*cultural community*). Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana komunitas yang amat ilmiah ini nantinya bisa berubah menjadi komunitas politis?¹¹³ Drummond

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 32.

¹¹¹ Heidegger menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sudah ada di dunia. Ia hidup selalu bersama yang lain. Untuk pemaparan lebih jauh, lihat Wattimena, Reza A.A., "Berbagai Metode Berfilsafat", dalam *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal. 127-239.

¹¹² Drummond, John, "Political...", hal. 32.

¹¹³ Di dalam bukunya Juergen Habermas berpendapat, bahwa ikatan di dalam masyarakat modern bukanlah lagi ikatan identitas primordial, melainkan ikatan legal-politis. Dalam arti ini komunitas kultural bukan lagi merupakan komunitas tradisional, melainkan komunitas politis. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Habermas, Juergen, *The Inclusion of the Other*, MIT Press, Cambridge, 1999.

mengajukan argumen berikut. Pada situasi normal masyarakat terasa seperti rumah yang tidak lagi dipertanyakan. Semua berjalan biasa-biasa saja. Hal itu terus berlangsung, sampai orang mulai menyadari keberadaan masyarakat ataupun komunitas kultural lainnya. Masyarakat lain ini disebut Drummond sebagai “alien”, yang berarti “yang lain”. Masyarakat yang lain ini memiliki tradisi kultural maupun norma-norma yang amat berbeda dengan masyarakat kita.¹¹⁴ Kehadiran yang lain ini bisa menjadi ancaman. Ketika itu terjadi maka masyarakat kultural setempat akan mengonsentrasikan dirinya, dan memutuskan untuk menjadi satu komunitas. Pada momen inilah menurut Drummond tercipta komunitas politis.¹¹⁵ Dalam arti ini komunitas politis adalah kumpulan orang yang tinggal di dalam daerah yang sama, yang memutuskan diri untuk menyatu, guna mempertahankan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang sudah dari ancaman kelompok lain, atau alien. Ini jugalah yang disebut Husserl sebagai “Kita yang bersifat nasional” (*national we*).¹¹⁶

Dalam arti ini seperti ditegaskan oleh Drummond, komunitas politis, walaupun tetap berakar pada komunitas kultural yang bersifat tradisional, bergerak melampaui definisi itu. Artinya komunitas politik tidak mengandaikan adanya kesamaan ras, agama, ataupun kesamaan bahasa tertentu. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, komunitas politis lahir dari kumpulan imigran ataupun pengungsi, akibat perang, bencana alam, ataupun katastrofi lainnya di tempat lain. Dari tempat yang berbeda-beda, mereka berkumpul, dan memutuskan untuk menciptakan komunitas politis yang berpijak pada keberagaman (*diversity*).

Hal ini paling jelas dalam kasus Amerika Serikat yang memang terbentuk dari kumpulan imigran dari seluruh dunia.¹¹⁷ Dalam hal ini Indonesia kiranya memiliki kasus yang sama. Negara kita terbentuk bukan karena kesamaan bahasa, etnis, ras, ataupun agama, tetapi karena kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah. Beragam kelompok yang terjajah tersebut bergerak bersama untuk menciptakan komunitas politis.¹¹⁸

Tafsiran saya bisa dilihat di Wattimena, Reza A.A., *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

¹¹⁴ Drummond, John, “Political...”, hal. 32.

¹¹⁵ Pendapat ini searah dengan argumentasi tua dari Herakleitos, bahwa perang adalah bapak dari segalanya. Untuk lebih lengkap silahkan dilihat di Osborne, Catherine, *Presocratic Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2004.

¹¹⁶ Seperti dikutip oleh Drummond, John, “Political...”, hal. 33.

¹¹⁷ Untuk sejarah perkembangan Amerika Serikat, mulai dari era imigrasi sampai sekarang, dapat dilihat di Leonard Dinnerstein and David M. Reimers, *Ethnic Americans: A History of Immigration*, Columbia University Press, New York, 1999.

¹¹⁸ Untuk sejarah Indonesia anda dapat membaca uraian yang amat menarik dari Drakeley, Steven, *The History of Indonesia*, Greenwood Press, London, 2005.

Dengan demikian perlu ditegaskan, bahwa komunitas politis memang bisa lahir dari komunitas kultural tradisional, namun itu tidaklah mutlak. Komunitas politis tidak lahir, karena kesamaan tradisi linguistik ataupun ras semata, melainkan karena apa yang disebut Drummond sebagai “determinasi internal” yang bersifat sukarela.¹¹⁹ Dengan determinasi internal ini, menurutnya, komunitas tradisional melampaui batas-batasnya sendiri, dan menciptakan pola komunitas yang baru yang bersifat lebih universal. “Orang-orang tradisional”, demikian tulisnya, “(berubah-reza) menjadi komunitas politik yang bersifat heterogen dengan pola otoritas yang tidak lagi dapat disempitkan melulu pada relasi keluarga ataupun nenek moyang.”¹²⁰

KOMUNITAS POLITIS SEBAGAI KOMUNITAS SUKARELA

Berbeda dengan komunitas alamiah, proses terbentuknya komunitas politis muncul dari kehendak pribadi individu. Bentuk komunitas semacam ini pun amat spesifik, seperti perkumpulan profesional, hobis, bisnis, dan sebagainya. Orang tidak lahir secara alamiah ke dalamnya, melainkan memilih untuk menggabungkan diri, seturut dengan kehendak pribadinya. Dengan memutuskan untuk menggabungkan diri ke dalam suatu komunitas tertentu, orang memilih untuk masuk ke dalam suatu tradisi tertentu, di mana ia harus *mengadopsi* kebiasaan yang ada. Tidak hanya itu dengan memutuskan untuk menggabungkan diri dengan suatu kelompok, orang juga diminta untuk *melanjutkan tradisi* kelompok itu ke generasi berikutnya.¹²¹

Drummond juga berpendapat bahwa komunitas yang sejati justru dibentuk secara sukarela. Dalam arti ini komunitas terdiri dari individu-individu yang secara sukarela mengikatkan dirinya. Namun Drummond juga menegaskan, bahwa komunitas sukarela tersebut, secara fenomenologis, sifatnya terbuka. Artinya orang bisa datang dan pergi sekehendak hatinya. Untuk menjelaskan lebih jauh tentang ini, Drummond secara fenomenologis mencoba mendefinisikan komunitas politis dalam dua hal, yakni sebagai interpenetrasi berbagai kehendak menjadi kehendak umum, dan sebagai komunitas moral. Saya akan menjabarkan penjelasan Drummond ini satu per satu.

¹¹⁹ Drummond, John, “Political...”, hal. 33. “What is required, then, is an account of the “internal determination” of the political community, of its voluntary aspects which transform it from a natural, homogenous, and traditional people into a potentially heterogenous political community with defined patterns of authority no longer reducible to familial or ancestral patterns of authority.”

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

Yang pertama, menurut Drummond, komunitas, pada hakekatnya, tidak bisa dilepaskan dari orang-orang yang membentuknya. Komunitas secara fenomenologis adalah kumpulan individu-individu, namun keberadaannya lebih dari sekedar kumpulan individu. Dalam arti ini komunitas memiliki makna dan hakekatnya sendiri, yang lebih dari sekedar individu-individu yang membentuknya. Di dalam komunitas politis yang bersifat sukarela, nuansa aktif dan kreatif di dalam mencipta jauh lebih terlihat. Namun nuansa aktif tersebut membutuhkan fondasi, dan fondasi itu adalah komunitas kultural alamiah yang telah ada sebelumnya. Nuansa aktif itu terbentuk dan berkembang melalui tindakan sosial (*social action*) orang-orang yang hidup di dalam komunitas itu. Contoh tindakan sosial itu, menurut Drummond, adalah menulis, membaca koran, membuat acara bersama, dan sebagainya. Maka komunitas politis juga terbentuk melalui jaringan komunitas yang sifatnya timbal balik. Jaringan inilah yang disebut sebagai kerja sama yang nantinya akan memberikan sumbangan tertentu bagi perkembangan komunitas itu sendiri.¹²²

Drummond lebih jauh menegaskan, bahwa tindakan sosial manusia memiliki beragam tingkatan. Pada level terendah ada tindakan yang dilakukan sekumpulan orang. Mereka terarah pada satu obyek tindakan yang sama, namun cukup sampai disitu. Artinya mereka memang memiliki horison yang sama, namun kedekatannya amatlah lemah. Bagi Drummond ini lebih seperti "sedikit lebih tinggi pengalaman-pengalaman terpisah yang bersifat kebetulan."¹²³ Misalnya seperti beberapa orang menonton konser musik yang sama, namun tanpa berkomunikasi satu sama lain.

Tindakan sosial yang kedua, menurut Drummond, adalah tindakan yang melihat komunikasi dan aktivitas bersama. Misalnya tetangga yang duduk bersama untuk membicarakan cuaca, harga telur, atau hanya bercanda satu sama lain. Di dalam tindakan sosial semacam ini, menurut Drummond, terjadi interaksi yang sifatnya timbal balik (*mutual*). Antara pembicara terjadi pula proses saling memberi dan menerima. Semua ini merupakan tanggapan sekaligus pemicu atas proses pembicaraan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Tindakan sosial yang ketiga, bagi Drummond, adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk berkomunikasi sekaligus memahami makna dari tindakan orang lainnya. Pemahaman makna ini nanti bermuara pada terciptanya tindakan yang dilakukan berdasarkan pemahaman (*understanding*) tersebut. Pemahaman tidak lagi tertanam di dalam pikiran, tetapi berubah menjadi tindakan nyata. Inilah yang bagi Drummond disebut sebagai bentuk tindakan sosial yang

¹²² *Ibid*, hal. 34.

¹²³ *Ibid*.

asli, di mana horison dari dua pihak melebur, dan berubah menjadi pemahaman.¹²⁴ Jika tindakan sosial dalam bentuk ketiga ini sudah tercapai, maka akan tercipta komunitas yang sejati, di mana setiap warga merasa dirinya sebagai sahabat sekaligus saudara satu sama lain. Mereka saling memahami satu sama lain.¹²⁵

Secara fenomenologis dapatlah ditekankan, bahwa setelah mencapai levelnya yang tertinggi, di mana komunikasi di dalam komunitas menciptakan pemahaman yang hampir menyeluruh, maka komunitas itu menjadi mandiri. Komunitas menjadi suatu sistem yang otonom, dan memiliki polanya sendiri.¹²⁶ Individu di dalamnya sekaligus memiliki otonomi pada dirinya sendiri, dan sekaligus menjadi bagian integral dari komunitas keseluruhan.¹²⁷ Komunitas memiliki ontologinya sendiri, dan tidak bisa dipahami hanya sebagai kumpulan individu belaka. Misalnya di dalam dunia penelitian filsafat politik.

Ada sepuluh orang yang melakukan penelitian di bidang filsafat politik. Mereka mengambil tema yang berbeda. Beberapa bekerja sama karena tema penelitiannya saling terkait. Sementara lainnya bekerja sendiri sesuai dengan minat penelitiannya. Setelah selesai mereka satu sama lain saling mengomentari dan menanggapi hasil penelitian yang ada secara kritis. Mereka juga menyadari bahwa hasil penelitian mereka saling bergantung satu sama lain. Artinya mereka saling berhutang satu sama lain di dalam mengembangkan penelitian filsafat politik yang ada. Maka tidak ada penelitian yang sepenuhnya berdiri sendiri. Filsafat politik sebagai bidang penelitian lahir melalui jaringan lintas peneliti yang saling mengembangkan satu sama lain. Inilah yang disebut sebagai Filsafat Politik, yang tidak bisa disempitkan melulu pada satu filsuf semata, sehebat apapun dia.

Rousseau pernah menegaskan bahwa dasar bagi kekuasaan politis adalah kehendak umum (*general will*), yakni kehendak seluruh pihak yang nantinya akan hidup di bawah suatu otoritas kekuasaan politis tertentu. Secara fenomenologis juga dapat dikatakan, bahwa esensi dari sebuah komunitas politis adalah kehendak umum. Komunitas itu ada terus berkembang, karena berjalan sesuai dengan kehendak umum warganya. Dalam arti ini kehendak umum adalah “aktivitas yang

¹²⁴ *Ibid*, hal. 35.

¹²⁵ Pada hemat saya komunitas semacam ini amat sulit tercipta di kota-kota besar dunia. Jumlah penduduk yang amat besar, ditambah dengan luas ruang yang terus bertambah, membuat komunikasi yang berkualitas menjadi amat sulit terwujud.

¹²⁶ Roy Bhaskar menyebutnya sebagai ontologi sosial. Sebagai teks pengantar anda bisa lihat Collier, A., *Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar's Philosophy*, Verso, London, 1994.

¹²⁷ Rousseau menulis hal ini dengan sangat baik: orang sekaligus hidup bersama dan hanya tunduk pada dirinya sendiri. Lihat Wattimena, Reza, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

saling mempengaruhi dari warganya.”¹²⁸ Komunitas yang didasarkan pada kehendak umum adalah komunitas sosial yang sempurna. Orang-orang di dalamnya memiliki kebebasan individual, tetapi sekaligus sadar akan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Komunitas semacam ini tidak terbentuk secara alamiah, melainkan dari dorongan sukarela para warga masyarakat.

Komunitas sukarela ini juga sudah selalu merupakan komunitas moral. Dapat dikatakan bahwa secara fenomenologis, masyarakat, sebagai komunitas politis sukarela, selalu sudah mengambil bentuk moralitas tertentu sebagai prinsip dasarnya.¹²⁹ Tidak hanya itu suatu komunitas sosial bisa bertahan, karena adanya moralitas yang tertanam di dalam setiap aktivitas sosialnya, dan semua ajaran maupun ritual tersebut diwariskan ke generasi berikutnya. Pertanyaan yang cukup penting disini adalah, kapankah komunitas moral tersebut tercipta? Menurut Drummond komunitas moral bisa tercipta, “ketika ada satu orang yang mengambil makan baik dan buruk dari orang lain sebagai makan baik dan buruk bagi dirinya sendiri.”¹³⁰

Maka sekali dapatlah ditegaskan, bahwa komunitas politis yang bersifat sukarela selalu mengambil bentuk komunitas moral (*moral community*). Dan dalam arti ini, juga perlu ditegaskan, bahwa moralitas disini adalah hasil dari pikiran manusia yang kemudian diterjemahkan ke level politis. Di dalamnya terkandung segala sesuatu yang dianggap bernilai di suatu masyarakat, dan mengarahkan masyarakat tersebut pada satu titik yang mereka harapkan. Pada titik ini Drummond mengajukan satu argumen yang, menurut saya, cukup menarik untuk dipikirkan lebih jauh. Baginya ada dua keutamaan politis yang bersifat universal, yang berarti berlaku dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun. Dua keutamaan itu adalah *compassion* dan keadilan.

Compassion adalah suatu bentuk emosi untuk merasakan, memahami, dan meringankan penderitaan orang lain.¹³¹ Sementara keadilan adalah keutamaan yang menjadi dasar dari semua kebijakan yang terkait dengan kehidupan bersama.¹³² “Tindak timbal balik berdasarkan keadilan”, demikian tulis Drummond, “dengan berpijak pada sikap melihat kebaikan di dalam diri orang lain.. tidak hanya berguna

¹²⁸ Drummond, “Political Community”, hal. 36.

¹²⁹ Cukuplah dikatakan bahwa moralitas adalah segala sesuatu yang terkait dengan baik dan buruk. Sementara etika adalah ilmu yang menganalisis moralitas. Untuk lebih lanjut anda bisa lihat di Magnis-Suseno, Franz, *Etika Dasar*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.

¹³⁰ Drummond, “Political Community”, hal. 37.

¹³¹ Lihat makna *compassion* dalam <http://rumahfilsafat.com/2011/05/02/filsafat-bisnis/>

¹³² Pada hemat saya keadilan adalah keutamaan yang memperlakukan yang sama secara sama, dan yang berbeda secara berbeda. Drummond tidak secara tegas menyatakan ini. Namun saya bisa menafsirkan dari tulisan-tulisannya.

untuk orang-orang individual semata, tetapi juga untuk komunitas secara keseluruhan.”¹³³ Dapat juga dikatakan tidak ada komunitas tanpa adanya sikap *compassion* dari setiap anggota komunitas tersebut, ataupun keadilan yang terwujud di dalam kebijakan-kebijakan komunitas tersebut. Inilah esensi dari komunitas politis yang terbentuk secara sukarela.

KESIMPULAN DAN TANGGAPAN KRITIS

Kita kembali pada pertanyaan yang juga adalah judul dari tulisan ini; komunitas politis, fakta atau hipotesa? Jawaban yang diajukan Drummond cukup lugas, bahwa komunitas politis adalah *fakta yang berkembang dalam hipotesa, sekaligus hipotesa yang berkembang dengan berpijak pada fakta*. Dalam arti ini fakta adalah apa yang terjadi di dalam dunia. Sementara hipotesa adalah kemungkinan-kemungkinan yang masih belum terwujud, namun bisa terus diperjuangkan untuk menjadi kenyataan.

Komunitas politis adalah sebuah fakta sosial yang bisa terus berubah dan berkembang, sesuai dengan keinginan orang-orang yang ada di dalamnya. Maka komunitas politis bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan amat dinamis. Komunitas politis bukan cuma fakta mati, melainkan jaringan yang terus berubah, sesuai dengan hipotesa anggotanya. Namun sebaliknya juga perlu ditegaskan, bahwa hipotesa tidak bisa lahir dari kekosongan, melainkan juga dari apa yang telah ada, dan itulah fakta sosial. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa komunitas politis adalah kombinasi dialektis antara fakta dan hipotesa; antara bentuk alamiah dan sikap sukarela.

Lepas dari kekuatan penjelasan dan upayanya untuk membuat terobosan, argumen Drummond masih memiliki beberapa kelemahan. Saya setidaknya memiliki tiga catatan. *Yang pertama*, argumen Drummond, yang sebenarnya banyak terinspirasi dari Husserl, bahwa komunitas politis merupakan kombinasi antara fakta alamiah dan sikap sukarela, sebenarnya tidak berbicara banyak. Ia mengambil posisi di tengah, dan berusaha seimbang. Sementara kita tahu betul, bahwa kombinasi mengandaikan keseimbangan, dan realitas kehidupan manusia, secara deskriptif, tidak pernah berada pada level seimbang. Maka menyatakan bahwa komunitas politis merupakan kombinasi dialektis antara fakta alamiah dan sikap sukarela sebenarnya tidak hanya tidak berbicara banyak, tetapi juga klise.

Yang kedua, jika diperhatikan secara khusus, maka sebenarnya Drummond juga masih jatuh ke dalam salah satu kutub perdebatan yang telah ada. Perlu dijelaskan bahwa perdebatan tentang makna dan proses terbentuknya “yang sosial” selalu

¹³³ Drummond, “Political Community”, hal. 38.

jatuh pada setidaknya salah satu dari dua kecenderungan. Yang pertama adalah kecenderungan untuk jatuh pada individualisme yang amat menekankan peran subyek sebagai anggota masyarakat yang mampu mengubah realitas (hipotesa lebih kuat). Sementara yang kedua adalah jatuh pada kecenderungan menekankan peran fakta alamiah, sehingga subyek, yang adalah anggota masyarakat, dianggap tidak relevan, atau tidak cukup kuat untuk melakukan perubahan (fakta alamiah lebih kuat).

Pertanyaan kritisnya adalah apakah Drummond masih jatuh pada salah satu kutub? Saya merasa ia masih jatuh ke dalam satu kutub, yakni kutub individualisme. Di dalam tulisan-tulisannya terlihat jelas, betapa ia amat menekankan pentingnya sikap sukarela di dalam proses perkembangan dan perubahan masyarakat. Terlihat juga betapa ia amat menekankan pentingnya peran keutamaan individual yang terkait langsung dengan kehidupan bersama. Dalam arti ini menurut saya, dapat dengan lugas dikatakan, bahwa Drummond jatuh ke dalam kutub individualisme, dan ini membuat seluruh argumennya berat sebelah.

Yang ketiga, dengan argumennya, Drummond seolah menutup perdebatan lebih jauh, dan tidak lagi menyisakan misteri untuk digali. Dengan mengatakan bahwa komunitas politis adalah fakta sekaligus hipotesa (lihat penjelasan sebelumnya), ia tidak membuka peluang untuk diskusi. Pada hemat saya jauh lebih baik, andaikata Drummond mengambil salah satu posisi, dan memberikan argumen yang baru atasnya. Dengan cara itu ia bisa membuka perdebatan lebih jauh tentang problematika tatatan “yang sosial” ini. Namun sekali lagi sumbangan teoritis Drummond, lepas dari segala kekurangannya, tetap perlu diperhatikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Boucher, David and Paul Kelly (eds), *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, Routledge, London, 1994.
- Collier, A., *Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar's Philosophy*, Verso, London, 1994.
- Dinnerstein, Leonard and David M. Reimers, *Ethnic Americans: A History of Immigration*, Columbia University Press, New York, 1999.
- Drakeley, Steven, *The History of Indonesia*, Greenwood Press, London, 2005.
- Drummond, John. J., “Political Community”, dalam *Phenomenology of the Political*, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed), Kluwer Academic Publisher, London, 2000.

- Femia, Joseph, *Gramsci's Political Thought*, Clarendon Press, Oxford, 1981. Harian Golomb, Jacob, *In Search of Authenticity*, Routledge, London, 1995.
- Kompas, Rabu 24 Mei 2011 dan Kamis 25 Mei 211.
- Loyal, Steven, *The Sociology of Anthony Giddens*, Pluto Press, London, 2003.
- Habermas, Juergen, *The Inclusion of the Other*, MIT Press, Cambridge, 1999.
- Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Hardiman, F. Budi, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Hardiman, F. Budi., *Ruang Publik*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Heidegger, Martin, *Being and Time*, Joan Stambaugh (trans), New York Press, New York, 1996.
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Dasar*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Osborne, Catherine, *Presocratic Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2004.
- Sasongko, James. W., "Manusia, Karya, dan Kuasa", dalam *Membongkar Rahasia Manusia*, Wattimena, Reza A.A., (ed), Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Snijders, Adelbert, *Manusia: Sintesis Paradoks*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- Steger, Manfred B. (et.al), *Neoliberalism*, Oxford University Press, Oxford, 2010.
- Turner, Stephen P. and Paul A. Roth, *Philosophy of the Social Sciences*, Blackwell, United Kingdom, 2003.
- Wattimena, Reza A.A., *Filsafat dan Sains*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Wattimena, Reza A.A., "Berbagai Metode Berfilsafat", *Metodologi Penelitian Filsafat*, Wattimena, Reza A.A (ed), Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Wattimena, Reza A.A., "Menebar Garam di Atas Pelangi", *Menebar Garam di atas Pelangi*, Hipolitus K. Kewuel, et.al (eds) STKIP Widya Yuwana Press, Madiun, 2010.
- Wattimena, Reza A.A., *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Sumber Internet:

- <http://rumahfilsafat.com/2011/05/02/filsafat-bisnis/>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Double_hermeneutic diakses pada 21 Maret 2011 pk. 09.20.
- <http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/what.asp> diakses pada 19 Maret 2011. Pk. 07.30.

<http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/political.asp>
diakses pada 19 Maret 2011. Pk. 07.40.

<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsourc/holo.html> diakses pada Jumat 11
Maret 2011 pk. 15.12.

<http://rumahfilsafat.com/2011/05/02/filsafat-bisnis/>